

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara pada dasarnya merupakan sebuah organisasi yang di dalamnya terdapat tiga aktor penting yang mengatur dan menjalankan roda pemerintahan. Tiga aktor penting itu yaitu lembaga yudikatif, lembaga legislative, dan lembaga eksekutif. Dalam menjalankan pemerintahan, negara memiliki kewajiban untuk membawa rakyatnya mencapai angan-angan bersama. Untuk mencapai angan-angan bersama itu, pemerintah tidak bisa melaksanakannya sendiri, perlu adanya partisipasi aktif dari lembaga non pemerintahan.

Sebagai sebuah negara dengan sumber daya alam yang melimpah menjadikan Indonesia sebagai suatu negara dengan pendapatan terbesar dari hasil tambangnya. Dengan kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau dan tidak sedikit pula di antara pulau-pulau tersebut menyumbangkan sumber daya mineral yang berharga. Pemanfaatan sumber daya ini sangatlah diperlukan agar dapat mensejahterakan masyarakat dan dapat membangun infrastruktur secara merata di seluruh penjuru Indonesia. Tidak dipungkiri lagi bahwasanya tambang menjadi sumber penerimaan negara bukan pajak terbesar. Berdasarkan dari Kementerian Keuangan, realisasi PNPB atas sektor mineral dan batubara hingga desember 2018

mencapai Rp 46,6 Triliun (Indra, 2019). Kegiatan tambang memberikan kontribusi signifikan terhadap APBN.

Dibalik besarnya pendapatan negara bukan pajak tersebut banyak sekali masalah yang berkenaan dengan lingkungan hidup, permasalahan lingkungan hidup berhubungan erat dengan tempat dan waktu, maka menjadi suatu kewajiban bagi setiap umat manusia untuk dapat menjaga, mengelola, dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar maupun lingkungan lainnya. Perubahan lingkungan yang terjadi pada suatu wilayah tidak hanya dipahami hanya dengan mengkaji sebuah proses yang terjadi pada wilayah tersebut atau pada lingkup lokalnya, namun adalah sebuah gabungan dari proses sosial, politik, dan ekonomi pada konteks sosial (*place-based*) dan pada luar lingkaran lokasi (*non-placed based*) baik yang memengaruhi langsung dan tidak langsung pada berbagai persoalan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam pada suatu lokalitas atau wilayah (Afiff n.d.).

Di Indonesia sendiri kerusakan lingkungan tercipta oleh pola kehidupan dan kebiasaan masyarakat yang kurang menghargai lingkungan. Segala ikhtiar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pengrusakan lingkungan secara terang-terangan sepenuhnya merupakan sebuah tanggung jawab baik dari pemerintah maupun perseorangan. Pencemaran, pengrusakan lingkungan, pengerukan sumber daya secara terus menerus merupakan sebuah kejahatan lingkungan yang telah menimbulkan dampak besar bagi kehidupan manusia, seperti terjadinya kebakaran

hutan, pemanasan global, kekeringan, tanah longsor, banjir bandang, serta dampak lainnya yang menimbulkan korban baik manusia itu sendiri maupun sumber-sumber ekonomi milik masyarakat dan fasilitas publik yang terkena dampak bencana tersebut. Menurut Blaiki (1985) dalam (Afiff n.d.) faktor-faktor lokal yang mempengaruhi perubahan lingkungan setempat ialah proses pengambilan keputusan di dalam keluarga, komunitas, ataupun berbagai peraturan pada tataran kelompok lokal yang dapat mempengaruhi kontrol, dan akses dari pemanfaatan sumber daya alam bagi setiap keluarga, komunitas, individu, dan kelompok lainnya.

Proses-proses pada kelas lokal yang telah memarginalkan dan meminggirkan masyarakat hingga mendesaknya ke dataran yang lebih tinggi ialah sebuah sebab dari aturan-aturan pada tingkat lokal yang tidak melihat masyarakat bawah, dataran rendah yang luas kini telah dikuasai oleh pemodal yang langsung mendapat persetujuan dan dukungan oleh pemerintah adalah sebuah hubungan produksi atas lahan yang dimanfaatkan, termasuk ke dalamnya sifat dasar dan kondisi fisik dari alam setempat. Faktor luar lokal yang mempengaruhinya antara lain: kebijakan pemerintah atas alokasi pemanfaatan sumber daya alam dan penguasaan lahan, permainan berbagai elit dan aktor yang mempengaruhi berbagai kebijakan pemerintah terkait dengan control dan akses terhadap sumber daya, harga pasar nasional dan internasional, kebijakan publik, dan proses lain yang dapat memengaruhi perubahan dan pengrusakan alam secara terang-terangan.

Bencana akibat kerusakan alam membuat kemiskinan dan ketimpangan semakin parah. Orang miskin adalah korban utama dari setiap banjir, longsor, kebakaran hutan serta pencemaran air. Lingkaran setan kemiskinan dan ketimpangan akan bertambah parah dengan resiko konflik sosial serta politik yang semakin mencekam. Kerusakan alam dan bencana adalah buah dari kekeliruan utama kita selama ini yaitu mengejar pembangunan (pertumbuhan ekonomi) dengan mengabaikan alam. Selama ini kita memandang sumber daya alam terbatas hanya minyak, gas dan tambang (emas, nikel, batubara dan pasir) yang alih-alih mensejahterakan justru menimbulkan banyak konflik. Bahkan hutan-hutan yang kita lihat kayunya, untuk dieksploitasi dengan cara menggundulinya, seperti yang sudah terjadi di Sumatra dan Kalimantan. Lahan yang subur kita perkosa untuk pertanian dan perkebunan yang cenderung monokultural skala besar (seperti sawit) dengan segala pupuk dan pestisida kimia yang merusak ekosistem. Itu pada akhirnya justru memperkecil produktivitas pertanian kita, serta memicu ketergantungan kita pada pangan impor.

Eksistensi perusahaan pengusahaan tambang di Indonesia kini banyak diperbincangkan oleh masyarakat luas. Ini diakibatkan oleh hadirnya perusahaan pengusahaan bahan galian tambang yang telah menimbulkan banyak dampak negatif. Menurut (Salim, 2004) terdapat empat dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang antara lain:

1. Konflik antara masyarakat sekitar tambang dengan perusahaan tambang

2. Rusaknya hutan-hutan yang berada di daerah sekitar tambang
3. Terjangkit penyakitnya masyarakat yang tinggal dan bermukim di area sekitar pertambangan
4. Tercemarnya laut.

Pertambangan sepanjang sejarah ialah sebuah bagian yang penuh polemik. Pada satu sisi tambang mendatangkan sumber energi dan materi sebagai wujud penting yang menjadikan kemodernan umat manusia menjadi mungkin. Pada sisi lain, perusahaan galian tambang pun dapat dikenal sebagai sektor yang mendatangkan begitu banyak problema pada lingkungan sekitar tambang. Banyak pertambangan ditemui dilakukan di dalam kawasan yang dapat dikatakan kawasan sensitif secara ekologi, selain hadir dan menimbulkan dampak bagi sekitar tambang hadir, berbenturan dan berada dalam sebuah area hunian masyarakat tradisional. Andaikata seluruh pertambangan dikelola dengan baik dan benar, kerusakan lingkungan sekitar tambang yang ditimbulkan oleh perusahaan galian tambang dapat diminimalkan.

Namun, melimpahnya hasil pertambangan di Indonesia cenderung tidak memberikan nilai tambah yang berpihak pada masyarakat lokal daerah pertambangan, masyarakat sekitar pertambangan cenderung banyak menerima dampak negatif dari hadirnya tambang tersebut. Di sisi lain, kerusakan alam harus ditanggung masyarakat sekitar belum lagi praktik-praktik curang yang dilakukan para pemilik modal untuk membuka lahan-lahan tambang baru tanpa

mempertimbangkan dampak-dampak buruk dari hadirnya tambang tersebut. Pengelolaan yang dinilai buruk telah melahirkan kerusakan lingkungan. Celah-celah raksasa bekas tambang yang tidak ditutup kembali mengakibatkan beberapa kali memakan korban jiwa. Pengusuran penduduk sekitar tambang secara tidak manusiawi, belum lagi konflik dengan masyarakat lingkar tambang adalah sebuah akibat dari ketidak konsistenan perusahaan pertambangan yang banyak dilaporkan. Begitupun dengan hasil materi dari pertambangan yang sepatutnya dapat dinikmati oleh negara dan masyarakat luas banyak yang hilang entah kemana.

Seperti di Kabupaten Sleman, yakni wilayah yang kaya akan sumberdaya alam berupa mineral bukan logam dan batuan berkualitas super, sumberdaya ini berasal dari Gunung Merapi yang secara berkala mengeluarkan material-material vulkanik. Dengan melimpahnya mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kab. Sleman ini, sejak dahulu masyarakat sekitar melakukan pertambangan rakyat yaitu swadaya menambang secara manual dengan alat tradisional dan gotong royong, selain itu banyak pula orang berbondong-bondong datang ke lereng Gunung Merapi untuk menambang pasir.

Namun kini berbanding terbalik ketika para pemodal masuk dan menjadikan lapak-lapak kecil mereka sebagai lahan pemerkosa alam secara terang-terangan. Sebelum dekade 1999, izin dan peraturan mengenai pertambangan dikelola oleh pemerintah pusat, namun ketika desentralisasi telah ditekan oleh pemerintah pusat

politisi di daerah diberi kekuasaan untuk mengelola sumber daya alam di wilayahnya masing-masing. Elit politik di tiap daerah diberi kekuasaan untuk menerbitkan izin perusahaan usaha pertambangan, yang diduga marak akan korupsi terutama sebagai bagian dari pendanaan politik mereka. Hal ini menyebabkan kenaikan tajam dalam total izin perusahaan usaha pertambangan yang diterbitkan naik dari 750 pada pertengahan tahun 2001 menjadi lebih dari sepuluh ribu pada tahun 2010, yang merupakan kenaikan tiga belas kali, dan hampir dari setengahnya ialah izin pertambangan batu bara (Greenpeace, 2018)

Potensi tambang pasir Merapi adalah aset terbesar Gunung Merapi. Dengan kualitas yang tinggi dan jumlah yang melimpah menjadikan pasir Merapi idola pada kelasnya. Hingga saat ini kenyataan pelaksanaan kegiatan pertambangan pasir di kawasan gunung Merapi belum sesuai yang diharapkan. Kegiatan pertambangan telah menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan lingkungan serta konflik vertikal dan horizontal. Ketidak berhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut disebabkan kurangnya kesadaran para stakeholder terhadap kelestarian lingkungan serta mentaati peraturan. Lemahnya pengawasan, pengendalian dan pembinaan kegiatan pertambangan serta belum ditegakkannya hukum yang ada. Perbedaan persepsi tentang pengelolaan pasir Gunung Merapi menjadi akar terjadinya konflik yang berkepanjangan dalam kegiatan penambangan pasir Merapi.

Seharusnya pemerintah dapat menangani berbagai masalah yang timbul dari hadirnya perusahaan usaha tambang di wilayah tersebut terutama permasalahan sosial. Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), dampak sosial dari bisnis perusahaan terhadap masyarakat sekitar perusahaan ialah dampak sosial yang timbul akibat perusahaan yang sifat, cakupan, efektivitas dari berbagai program dan praktik dari operasi perusahaan tersebut terhadap masyarakat (Irawan 2013).

Masyarakat lereng merapi yang sebagian berprofesi sebagai petani kini merana karena tingkat kesuburan tanah telah menurun dan muka air tanah menjadi lebih turun dari keadaan sebelum penambangan pasir secara besar-besaran. Kerusakan lingkungan tersebut mulai berdampak terhadap masyarakat sekitar penambangan pasir. Penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan bertani membuat pola mata pencaharian masyarakat sekitar berpusat di sekitar penambangan pasir, mulai dari sektor perdagangan hingga profesi kuli angkut dan penambang pasir manual.

Masyarakat juga tidak bisa mencegah kerusakan yang ditimbulkan penambangan pasir, karena merasakan dampak ekonomi yang lebih dibandingkan tidak ada penambangan pasir besar. Belum lagi jalur evakuasi yang seharusnya digunakan untuk jalur sewaktu-waktu bila gunung Merapi melontarkan isinya kini telah rusak akibat lalu lalangnya mobil-mobil bermuatan pasir. Berbagai implikasi dari kerusakan lingkungan akibat hadirnya pertambangan tidaklah jauh dari keterlibatan elit lokal dan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang

memuluskan jalannya tambang di wilayah tersebut. Kita perlu membatasi praktek ekonomi yang tidak ramah lingkungan, seperti tambang dan pertanian monokultur. Tapi, itu juga harus dibarengi dengan memperluasnya jenis-jenis bisnis atau industri ramah alam.

Pada kasus konflik tambang di Desa Sindumartani CV. Kayon sebagai pihak penambang telah mensosialisasikan tentang rencana hadirnya tambang di Desa Sindumartani. Namun dalam teknisnya tidak seluruh masyarakat desa diundang pada agenda tersebut. Melainkan hanya masyarakat yang menyetujui hadirnya tambang CV. Kayon. Masyarakat yang tidak sepakat dengan hadirnya tambang di Desa Sindumartani resah karena takut wilayah dan kebunnya akan berdampak buruk akibat dari aktifitas tambang tersebut.

Bermula dari keresahan masyarakat lahirlah gerakan sosial yang bernama Paguyuban Sindu Tolak Asat (PSTA). Selain hadir sebagai wadah aspirasi PSTA juga memiliki tujuan untuk melestarikan Sungai Gendol. Ditengah penolakan terhadap aksi penambangan yang dilakukan oleh CV. Kayon baik anggota PSTA maupun masyarakat banyak mendapatkan tindakan intimidasi bahkan hingga upaya penyuapan yang diduga dilakukan oleh pihak korporasi.

Hadirnya CV. Kayon di Desa Sindumartani adalah sebuah gambaran pengambilan berbagai kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan dan tujuan masyarakat atau dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk pemanfaatan 'kuasa' yang

berujung pada lahirnya konflik vertikal antara masyarakat Sindumartani dan para elit lokal.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas dapat disimpulkan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bagaimana peran elit politik lokal dalam persoalan penambangan pasir yang berimplikasi pada kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Merapi, Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran elit lokal dalam perusahaan usaha pertambangan yang berimplikasi pada kerusakan lingkungan di kawasan Gunung Merapi, Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui perlawanan masyarakat dalam konflik tambang melalui hadirnya gerakan sosial baru di Desa Sindumartani

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan di dalam konsepsi perusahaan tambang dimana lebih memperhatikan faktor-faktor yang dapat mengancam masa depan alam raya di berbagai penjuru daerah. Karena dengan

terjaganya alam selamatkan kehidupan manusia, dan warisan alam yang kita jaga akan diteruskan oleh cucu, cicit kita sebagai umat yang berfikir. Selain itu, penelitian ini dapat memberikan sebuah perubahan terkait dengan kebijakan yang telah diimplementasikan sesuai dengan aturan yang jelas.

2. Manfaat Teoritis

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah ilmu, manfaat serta wawasan yang cukup luas tersendiri bagi pihak peneliti. Karena, dengan lahirnya permasalahan yang ditekankan pada sebuah kebijakan akan menjadi sebuah kunci dimana hadirnya sebuah jawaban dari permasalahan dalam implementasi sebuah kebijakan tersebut.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan hasil penelitian ini terkhusus bagi para oknum di dalam perusahaan usaha tambang yang selalu mencari celah di dalam setiap waktunya. Baik itu dari pihak pemerintah daerah maupun oknum-oknum yang berada langsung di lapangan lokasi tempat perusahaan galian tambang diharapkan kerja nyatanya dalam sebuah proses pelaksanaannya dan diharapkan dapat menempuh sebuah titik kepedulian terhadap lingkungan alam raya. Karena pada setiap proses implementasi kebijakan masih sering terjadinya sebuah kendala dan problematika yang bertentangan dengan kehendak dan keinginan masyarakat. Terkhususnya bagi masyarakat yang

tinggal pada sekitar lokasi perusahaan tambang. Dalam tahap ini, perencanaan melalui berbagai pertimbangan dalam menyusun sebuah kebijakan haruslah selalu memiliki sebuah dasar yang jelas tanpa harus mengorbankan masa depan lingkungan. Pada satu sisi tambang menghadirkan materi dan energi yang dibutuhkan manusia namun pada satu sisi tambang telah menjadi lubang yang menyebabkan corak buruk terhadap lingkungan. Karena bila tidak dikontrol oleh masyarakat itu sendiri oleh siapa lagi alam akan dirawat.

c. Bagi Penambang

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sebuah sarana untuk memperjelas prosedur dan regulasi pertambangan, dan juga dapat menjadi pembuka sebuah era dimana tidak akan lagi hadirnya sebuah budaya 'kongkalikong' di dalam prosedur terlahirnya sebuah perusahaan tambang.

E. Tinjauan Pustaka

Untuk sumber awal penelitian, maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan referensi penulis. Maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis rangkum sebagai berikut :

Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka

No	Judul	Nama Penulis	Hasil Penelitian
1.	Pertarungan Aktor Dalam Konflik Penguasaan Tanah Dan Penambangan Pasir Besi di Urut Sewu Kebumen	Devy Dhian Cahyati	<p>Konflik Ekologi di Urut Sewu terjadi karena klaim sepihak wilayah oleh TNI AD yang dihadiahi persetujuan oleh pemerintah. Klaim ini mengakibatkan terjadinya marginalisasi ekonomi dan politik pada tubuh masyarakat.</p> <p>Urut Sewu dipertahankan sebagai wilayah pertahanan dan uji coba terhadap senjata sekaligus menjadi sebuah wilayah bisnis dalam penambangan pasir besi, dipertahankan oleh TNI AD, Pemkab, dan didukung oleh DPRD.</p> <p>Masalah kepemilikan tanah beserta fungsinya tidak akan selesai apabila pemerintah yang memiliki kuasa tidak bertindak tegas dan objektif didalam menyelesaikan konflik di Urut Sewu.</p>
2.	Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Menuju Kemandirian Ekonomi Pasca Tambang di Desa Sarij aya	Asa Ria Pranoto, Dede Yusuf	<p>Pelaksanaan program CSR PT Pertamina EP <i>Field Sanga-Sanga</i> telah dilaksanakan berdasarkan nilai-nilai CSR yang memiliki prinsi <i>bottom line</i>. Hal ini sangat sesuai dengan acuan pelaksanaan ialah yang bertumpu pada aspek aspek ekonomi mandiri serta aspek <i>main issue</i>.</p> <p>Program CSR dilaksanakan dengan tiga tahap utama, ialah tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi.</p>

3.	Aktor, Akses Dan Politik Lingkungan di Pertambangan Timah Bangka	Erwiza Erman	<p>Liberalisasi yang telah merambah pada sistem penambangan timah pada era reformasi dan otonomi daerah telah melahirkan desentralisasi dan proses demokratisasi pada bisnis perusahaan usaha tambang timah. Kendornya kontrol pusat, dan proses desentralisasi pada pengontrolan sumber daya timah kini sedang terjadi.</p> <p>Diversitas pengelolaan sumber daya timah dan politik lingkungan jua ditemukan pada masyarakat lingkaran tambang. Sikap pro dan kontra yang digambarkan masyarakat dengan politik protes dan kolektif di kalangan dan di dalam tubuh masyarakat petani dan nelayan Bangka terhadap sumber daya tambang dan isu kerusakan lingkungan lingkaran tambang beriring sejajar dengan hilangnya akses sumber kehidupan masyarakat lingkaran tambang.</p>
4.	Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia	Nanang Indra Kurniawan	<p>Pada studi ini ditegaskan ulang bahwa kategori dikotomis dalam memandang masalah lingkungan tidaklah relevan. Masalah lingkungan dan solusinya terhadap pembangunan tidaklah lagi terletak pada persoalan manusia dan alam, ataupun pada soal krisis ekologi. Namun jika dilihat jauh lagi yang terlebih penting ialah melihat secara luas relasi aspek-aspek diantara keduanya.</p> <p>Dominannya pembangunan berkelanjutan pada prakteknya telah terbukti terjadinya penafsiran dan</p>

			<p>penerjemahan ulang. Karenanya strategi ilmu menjadi sebuah jawaban penting bagi berbagai kelompok sosial agar bisa keluar dari dominasi yang ada.</p>
5.	<p>Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)</p>	Hafid Rahardjo	<p>Konflik yang terjadi antara NNT dan pemerintah bertumpu pada relasi dua aktor semata. Selain antara NNT dan pemerintah terdapat aktor lain yang terlibat ialah pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, yang didalamnya terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten Sumbawa serta Sumbawa Barat.</p> <p>Relasi patrimonial yang subyektif terjalannya aliansi antara pemerintah daerah dan kapital lokal. Yang tadinya kapital hanya berfokus pada sektor bisnis telah berubah menjadi oligarki yang kuat dalam memengaruhi dunia perpolitikan.</p> <p>Pola relasi subyektif antara pemodal dan negara masih mengemuka meski seharusnya yang berlaku adalah pola relasi obyektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
6.	<p>Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen</p>	Annisa Innal Fitri, Idil Akbar	<p>Perempuan pada kasus pabrik Semen Rembang telah mewujudkan reponnya dalam bentuk gerakan sosial melawan pabrik semen. Perkembangan ini mengarah pada terciptanya ruang yang memberi kesetaraan bagi perempuan baik secara individual maupun perempuan sebagai komponen masyarakat.</p> <p>Para aktivis perempuan tersebut merasa memiliki hak sebagai masyarakat sipil untuk</p>

			mengemukakan pendapat sebagai <i>input</i> suatu kebijakan social.
7.	Konflik Penambangan Pasir Besi di Desa Garongan Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo	Rahmat Andi Wiyanto	Konflik yang terjadi di Desa Garongan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dikarenakan masyarakat menolak eksplorasi yang dilakukan oleh perusahaan pengusaah tambang, masyarakat menganggap bahwa lahan pesisir adalah tanah merah atau tanah negara bukan tanah PAG. Jika penambangan dilakukan akan menimbulkan dampak buruk bagi perekonomian warga dan akan menimbulkan dampak sosial. Belum lagi dampak lain yaitu suplai sumber air desa yang semakin berkurang dan lahan tanam warga yang nantinya tidak subur kembali meski akan dilakukannya reklamasi.
8.	Konflik Pertambangan Pasir Besi di Desa Wogalih, Kecamatan Yosowilangun, Kabupaten Lumajang Tahun 2010-2011	Risalatul Ma'arif, Nawiyanto, Ratna Endang W	<p>Hadirnya tambang di Desa Wogalih telah memunculkan pro dan kontra akibat pemerintah telah memberikan izin pada PT Antam.</p> <p>Tambang memicu konflik yang melahirkan kelompok pro dan kontra. Pihak pro terhadap tambang memandang tambang dengan argumentasi ekonomis dengan mendukung posisi mereka, kegiatan tambang dianggap mampu menjadi berkah terhadap perusahaan perusahaan tambang, pemerintah, dan masyarakat lingkaran tambang.</p> <p>Sedangkan kelompok kontra memandang kegiatan tambang tidak banyak menghadirkan berbagai dampak positif terutama secara ekonomis, tambang tidak banyak menghadirkan kesejahteraan bagi</p>

			masyarakat namun tambang mereka pandang mendatangkan ancaman atas resiko hadirnya bencana, kerusakan lingkungan, dan juga Desa Wotgalih merupakan kawasan hutan lindung.
9.	<p><i>Role Players Analysis</i> Dalam Konflik Pengelolaan Sumber Daya Alam</p> <p>(Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011)</p>	Ignasius Usboko	<p>Konflik pertambangan mangan di Kabupaten Timor Tengah Selatan menurut teori konflik Wirawan terdapat enam fase konflik yaitu konflik laten, fase pemicu, fase eskalasi, fase krisis, fase resolusi konflik, dan yang ke tujuh yaitu fase pasca konflik yang tidak berlaku karena selama penelitian berlangsung hingga selesai penelitian konflik masih berlangsung dan belum menyentuh fase tersebut.</p> <p>Konflik yang terjadi pada pertambangan Mangan dipengaruhi oleh perbedaan pendapat, kepentingan, dan tujuan serta komunikasi dan klarifikasi. Faktor sebab ini mendorong terlahirnya konflik laten karena yang dipicu oleh persilangan kata, perbedaan pendapat, dan layangan surat.</p> <p>Pendekatan penegakan hukum positif melalui pengadilan dilakukan dalam upaya untuk penyelesaian konflik.</p>
10.	Relasi Kerjasama Elit Kapitalis Dengan Elit Lokal Tambang Emas (Studi Kasus) Timika Papua	Yonas Yanampa, Tri Sulistyaningsih, Asep Nurjman	Relasi kerjasama antar elit kapitalis Amerika, Pemerintah Indonesia, dan elit lokal Timika Papua, dapat dibentuk berdasarkan komitmen dan janji pertukan jaringan informasi bisnis politik ekonomi antar kedua negara, yang sedang berjalan dan bergerak dibidang industri

			<p>pertambangan emas di Timika Papua, menjadi kepentingan berbagai stakeholder. Fakta membuktikan bahwa sekelompok orang yang terlibat dalam kerjasama ini, mendapatkan fasilitas yang cukup mewah ketimbang masyarakat yang tidak terlibat (bekerja) justru dapat diskriminasi, dialienasikan, dikucilkan, diintimidasi dan diabaikan komoditas-komoditas pemilikannya. Akhirnya timbul konflik vertikal antar perusahaan dengan masyarakat, tetapi karena jaminan perlindungan aparat keamanan sehingga konflik teratasi dengan baik dan konflik juga diterima sebagai sesuatu yang baik. Kapitalis Amerika adalah pemilik modal (uang) yang mendominasi bisnis politik ekonomi, terutama dibidang industri pertambangan, pertanian.</p>
--	--	--	--

Dari sepuluh penelitian diatas mengenai dampak hadirnya tambang dan implikasinya terhadap kerusakan lingkungan, dapat disimpulkan bahwa terdapat sebuah perbedaan konsep yang digunakan oleh mereka. Kemudian sepuluh jurnal tersebut terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan saat ini khususnya dalam kerusakan lingkungan akibat hadirnya tambang. Persamaan dalam penelitian ini adalah tambang diberbagai tempat sama-sama memberikan kontribusi signifikan terhadap perubahan kualitas

lingkungan, dan hasil dari kerusakan yang dihasilkan tambang tidaklah sebanding dengan pendapatan yang dihadirkan oleh tambang, naluri alamiah masyarakat lokal untuk mempertahankan kawasannya agar tetap lestari adalah sebuah perlawanan nyata dan menunjukkan bahwa tambang benar benar bersifat destruktif. Namun dari sepuluh literatur tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini teori, hasil, dan lokasi penelitian.

F. Kerangka Dasar Teori

1. Ekologi Politik

a. Pengertian Ekologi Politik

Ekologi politik adalah sebuah pendekatan eklektik untuk menganalisis konteks politik hubungan antara manusia dan alam, Ekologi politik menitikberatkan analisis terhadap keterkaitan antara sistem ekonomi politik global dengan krisis dan degradasi lingkungan yang terjadi di ranah lokal (Robbins 2011).

Menurut (Paul Clokce, 2005) ekologi politik ialah sebuah cabang ilmu yang berasal dari berbagai disiplin seperti geografi dan ilmu-ilmu sosial. Ekologi politik menelisik berbagai fenomena kekeringan, perubahan iklim, deforestasi, dan perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia

Menurut Adiwibowo (2005) dalam (Riza, 2017) ekologi politik ialah jenis penelitian lapangan yang membahas hubungan antara ekonomi politik

di antara komunitas atau masyarakat secara luas terhadap perubahan lingkungan.

Menurut Bryant (1997) dalam Adiwibowo (2005) mendefinisikan ekologi politik sebagai penyelidikan politik sumber daya, kondisi dan konsekuensi perubahan lingkungan yang terjadi ketidaksetaraan sosial-ekonomi dan proses politik yang ada.

Forsyth (2003) dalam Adiwibowo (2005) berpendapat bahwa "sains" tidak mungkin dipisahkan dari "politik". Dia memperkenalkan ekologi politik "kritis" sebagai istilah untuk menandai bahwa sains dan politik harus dilihat sebagai saling memperkuat di setiap tahap, atau sebagai "*co-produced*".

Berdasarkan lima definisi ekologi politik yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ekologi politik itu lebih menitik beratkan pada keterkaitan antara politik, sumber daya, dan perubahan lingkungan.

b. Gerakan Aktor Ekologi Politik

Tujuan dari ekologi politik tidaklah semata sebagai penjelas atas fenomena perubahan lingkungan. Tetapi juga merupakan sebuah batu pijakan dalam formulasi kebijakan pengelolaan lingkungan. Oleh karenanya penting ekologi politik dapat menjadi sebuah pendekatan dalam memahami isu-isu maupun dalam formulasi kebijakan yang bersinggungan dengan lingkungan.

Menurut Herman Hidayat (2011), ekologi politik memiliki salah satu pendekatan yaitu pendekatan kajian gerakan aktor, menurutnya pada kajian gerakan aktif membahas dan mengenalkan gerakan aktor sebagai pelaku pada pengelolaan lingkungan untuk mencari dan menentukan sejauh mana aktor atau pelaku pengelolaan lingkungan tersebut berkontribusi pada pengelolaan lingkungan. Aktor tersebut menurutnya terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Peran aktor langsung

Pada aktor langsung disini adalah negara, dimana negara dapat menjamin terbentuknya sebuah pembangunan yang beriringan dengan kelestarian lingkungan, namun negara disini dapat menjadi aktor yang berlawanan dengan tujuan awalnya yaitu negara sebagai penanggung jawab dalam berbagai kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan lingkungan dan berbagai implikasi kebijakan yang bertentangan dengan pelestarian lingkungan, dan negara sendiri disini sebagai eksekutor, pengawas, serta pengelola hingga evaluasi.

2. Peran aktor tidak langsung

World Bank, Asian Development Bank, International Monetary Fund, dan sebagainya adalah lembaga keuangan internasional yang menjadi aktor tidak langsung. Peran lembaga keuangan internasional disini merupakan sebagai aktor tidak langsung karena turun memberikan kontribusi sebagai

pemulus keuangan dan penyedia dukungan secara teknis dalam pengembangan banyak proyek.

Lalu peran aktor tidak langsung terdapat akademisi dan LSM yang dimana disini berperan sebagai aktor yang kritis. Akademisi dan LSM menjadi pengamat guna memberikan kritikan atas kebijakan pemerintah, dengan mengkritik kesadaran pemerintah pada berbagai permasalahan lingkungan.

c. Implikasi Ekologi Politik

Berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan rata-rata diakibatkan oleh buruknya relasi manusia dan alam tanpa disadari manusia telah melakukan eksploitasi besar-besaran yang berujung pada kerusakan lingkungan jangka panjang. Bersamaan dengan rusaknya lingkungan banyak perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar lingkungan yang memperjuangkan lingkungannya agar tetap terjaga.

Konflik lingkungan dapat didefinisikan sebagai bentuk spesifik dari konflik sosial yang berhubungan baik dengan perjuangan untuk mendapatkan akses sumber daya alam atau perjuangan yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya alam (Turner, 2004). Pemanfaatan dan kontrol terhadap sumber daya alam yang ada seringkali menjadi lalai untuk dilakukan karena kita hanya terfokus pada cara penanganan berbagai masalah yang terjadi akibat adanya kerusakan lingkungan. Selain konflik lingkungan yang diakibatkan oleh

politik lingkungan yang dilakukan para 'kuasa' kerusakan lingkungan adalah bukti nyata dari buruknya relasi manusia dan lingkungan.

2. Gerakan Sosial Baru

a. Gerakan Sosial

Anthony Giddens dalam (Suharko, 2006) menjelaskan bahwa menurutnya gerakan sosial ialah sebuah usaha kolektif guna mencapai terwujudnya sebuah kepentingan bersama, menggapai tujuan bersama dengan usaha kolektif (*collective action*) dan menempatkan sebuah gerakan yang berkedudukan pada luar pemerintahan. Hampir sama dengan Giddens, Metta Spencer dalam (Sukmana, 2016) memaparkan gerakan sosial ialah suatu *collective action* yang dilakukan guna tercapainya sebuah tatanan kehidupan yang baru dan sebuah perubahan baru, Spencer menjelaskan hadirnya sebuah *collective action* yang memiliki arah guna terwujudnya tatanan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya merupakan sebuah sifat utama dari sebuah gerakan sosial (Sukmana, 2016).

Menurut Donatella dan Mario (2006) organisasi gerakan sosial terbagi menjadi dua golongan, yaitu organisasi gerakan profesional dan organisasi gerakan sosial partisipatif. Menurut Donatella gerakan sosial yang didalamnya tidak memiliki unsur professional, tidak memiliki sistem manajemen dan struktur formal disebut sebagai organisasi gerakan sosial

partisipatif. Seperti pada organisasi protes kelompok tani, buruh dan kelompok akar rumput dan sebagainya (Donatella Della Porta, 2006).

Sedangkan sebuah organisasi yang didalamnya terdiri oleh masyarakat yang menjadi korban, lalu pada golongan ini terlahir dengan berbagai unsur profesional yang didalamnya terdapat sistem manajemen dan struktur formal dapat disebut sebagai organisasi gerakan sosial profesional yang otomatis organisasi ini memiliki kecakapan pada teknis dalam berbagai keperluan gerakan, ciri tersebut terdapat pada LSM.

Dari beberapa paparan sebelumnya dapat ditarik benang merah bahwasanya gerakan sosial merupakan sebuah gerakan kolektif yang tujuannya untuk mencapai tujuan bersama dengan cara upaya kolektif untuk mencapai kepentingan bersama.

Rajendra Singh (2010) menjelaskan bahwa gerakan sosial dapat dikelompokkan ke dalam tiga perspektif, yakni:

- a. Klasik (*Classical*) ialah sebuah perspektif klasik yang didalamnya berisi studi-studi mengenai perilaku kolektif dari kerusuhan (*riot*), kerumunan (*crowd*), dan kelompok pemberontakan (*rebel group*).
- b. Neo-klasik (*The Neo-Classical*) pada kaca mata perspektif ini lebih mengaitkan pada tradisi utama dalam studi-studi gerakan sosial lama (*Old Social Movements*). Tulisan-tulisan perspektif neo-klasik banyak terpublikasi sehabis era tahun 1950.

c. Kontemporer (*Contemporary*) pada perspektif ini disandingkan dengan era gerakan sosial baru (*New Social Movement*). Studi ini lahir mempelajari masyarakat di Eropa dan Amerika pada tahun 1960 hingga 1970, ketika bermunculannya gerakan skala besar pada isu-isu yang terjadi di kehidupan masyarakat, dan meliputi beberapa aspek yaitu non-materialistik (*non-materialistic*), humanis (*humanist*), dan kultural (*cultural*).

b. Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial baru secara pokok bersifat universal, yaitu mengarahkan agar menumbuhkan dan memberi perlindungan serta mempertahankan tatanan kehidupan kearah yang lebih baik. Sedangkan gerakan sosial lama berbeda karena terjebak pada diskursus ideologi sebagaimana perjuangan kelas (*classstruggle*), revolusi keras (*class revolution*), dan anti-kapitalisme (*anticapitalism*) (Sukmana, 2016).

Menurut (Situmorang, 2007) beberapa teori yang dipakai dalam menelaah sebuah gerakan sosial yaitu teori proses framing, teori struktur mobilisasi, teori struktur kesempatan politik, dan teori keluhan. Sedangkan bagi Alberto Melucci dalam (Situmorang, 2007), sebuah gerakan yang terbentuk dari sebuah reaksi dan keluhan baru dapat disebut sebagai gerakan sosial baru. Menurut Joe Fowerker dalam (Situmorang, 2007), gerakan sosial baru hadir karena keluhan baru. Pada negara-negara Eropa keluhan itu berbentuk subordinasi kapitalis, ekspansi kapitalisme yang merambah

budaya, komersialisasi kehidupan sosial, birokrasi di masyarakat, kebahagiaan dan seksualitas, dan intervensi media massa terhadap homogeni kehidupan masyarakat. Berbeda dengan Amerika Latin, disini keluhan baru menstimulasi gerakan sosial baru, yang diakibatkan oleh tindakan represif militer, gagalnya pembangunan, dukungan terhadap kebijakan populis dan penolakan kebijakan populis seperti halnya pendidikan gratis bagi orang tidak mampu ialah sebuah keluhan baru yang dipakai dalam membangun gerakan sosial.

Chalmer Johnson dalam (Situmorang, 2007) menjelaskan bahwa pendorong utama gerakan sosial ialah hadirnya keluhan-keluhan pada dimensinya yang dapat bercorak mikro (individu) maupun makro (sistemik). Chalmer Johnson mengutip penelitian Alfred Russel tentang faktor ketidakseimbangan sosial, yaitu:

1. Perang, yang menghabiskan sumber daya ekonomi masyarakat ialah sebuah faktor utama yang ditimbulkan oleh perang.
2. Wabah penyakit, mengakibatkan perubahan pada struktur populasi manusia.
3. Perubahan iklim, yang mengakibatkan hancurnya hal dasar makhluk hidup.
4. Konflik internal, antar elit dan massa yang menyebabkan kerugian dari suatu kelompok masyarakat.
5. Posisi subordinasi dan inferior dari suatu kelompok masyarakat.

Menurut Donatella D. Porta dan Mario Diani dalam (Situmorang, 2007), teori keluhan sangat relevan dipakai untuk menjelaskan dan memahami hadirnya gerakan lingkungan, karena keluhan baru hadir selalu memicu lahirnya gerakan baru. Saat hadirnya gerakan lingkungan di dunia tak terkecuali di negara Indonesia kebanyakan dipicu oleh degradasi lingkungan seperti pencemaran, rusaknya hutan yang kemudian memicu berbagai bencana. Pencemaran lingkungan dan rusaknya hutan adalah salah satu dari banyak sebab munculnya keluhan baru masyarakat dan mendorong terlahirnya gerakan lingkungan hidup.

Dalam gerakan sosial baru terdapat beberapa pendekatan teori yang dapat digunakan dalam memahami suatu gerakan sosial yaitu teori kesempatan struktur politik dan teori keluhan (Situmorang, 2007).

1. Teori Kesempatan Politik

Di Indonesia sendiri proses keterbukaan demokrasi terjadi pada saat memasuki era reformasi yang menghadirkan kesempatan untuk sebuah gerakan lingkungan menjadi berkembang dan membuka keleluasaan untuk melakukan kritikan atas proses berbagai kebijakan yang bertentangan dengan pelestarian alam.

Doug Mc Adam dan Sidney dalam Situmorang (2007) melebarkan variabel-variabel teori kesempatan politik, yaitu: Pertama, terbukanya akses terhadap berbagai lembaga politik mengakibatkan gerakan sosial mudah

berkembang. Kedua, ketika ketidakseimbangan politik terjadi di negara di sisi lain keseimbangan baru akan mulai terbentuk. Ketiga, ketika konflik terjadi pada tataran elit politik, konflik tersebut menjadi sebuah kesempatan bagi sebuah gerakan sosial untuk melakukan sebuah perubahan. Keempat, ketika para aktor pada sebuah gerakan sosial mencari sebuah dukungan dari para elit politik yang berada pada sistem untuk melakukan sebuah perubahan.

2. Teori Keluhan

Menurut Alberto Melucci dalam Situmorang (2007), gerakan sosial baru adalah sebuah gerakan yang dibentuk atas reaksi dari suatu keluhan baru. Menurut Joe Fowerker dalam Situmorang (2007), terbentuknya gerakan sosial baru terdorong atas reaksi dari sebuah keluhan baru. Di negara-negara Eropa, keluhan dapat berbentuk subordinasi kapitalis, ekspansi kapitalisme yang merambah budaya, komersialisasi kehidupan sosial, birokrasi di masyarakat, kebahagiaan dan seksualitas, dan intervensi media massa terhadap homogeni kehidupan masyarakat. Pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan secara besar-besaran adalah salah satu sebab munculnya berbagai keluhan baru masyarakat dan mendorong terbentuk dan berkembangnya gerakan lingkungan hidup.

3. Elit dan Kekuasaan

a. Elit

Elit bisa diartikan sebagai sebuah kedudukan atau posisi pada struktur sosial terpenting, seperti pada bidang pemerintahan, ekonomi, politik, kemiliteran, pengajaran, dan agama (Haryanto, *Kekuasaan Elite*, suatu bahasan pengantar, 2005). Dengan begitu dapat ditarik benang merah bahwasanya pemahaman sebelumnya telah menggiring pada sebuah realita bahwasanya elit adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki nilai lebih pada hal tertentu atau dengan dapat disebut unggul, dimana dengan sebuah keunggulan yang melekat pada dirinya tersebut seseorang atau sekelompok orang tersebut dapat menahkodai peran yang berpengaruh dan menonjol pada suatu sistem dan struktur kekuasaan tertentu. Berdirinya elit pada sebuah titik kekuasaan dihantarkan oleh sebuah sifat yang melekat pada dirinya sendiri.

Kelompok hingga individu yang mempunyai keunggulan dalam artian mempunyai akses dan nilai lebih dari yang lainnya dan saat elit ini tiba di posisi puncak dari sebuah struktur sosial yang mengelilinginya maka elit tersebut memiliki pilihan besar dan luas dalam menjalankan sebuah kontrol sosial pada sebuah mekanisme politik.

Dalam kaitannya dengan elit, masyarakat yang relatif homogen memiliki kecenderungan untuk memiliki elit yang tidak begitu beragam jenisnya. Elit yang ada di masyarakat biasanya memiliki pengaruh pada beberapa cabang kehidupan sekaligus, hal ini dikarenakan masyarakat

homogen belum begitu kompleks ragam kebutuhan dan sifat hubungan antar-anggota masyarakat, kondisi seperti ini memungkinkan seseorang untuk bergerak secara aktif dan memiliki pengaruh pada beberapa cabang kehidupan sekaligus (Haryanto, 2017).

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik benang merah bahwa terminology elit merujuk pada seseorang atau kelompok yang memiliki keunggulan-keunggulan untuk menjalankan peran yang menonjol dan berpengaruh pada cabang kehidupan tertentu seperti dalam bidang ekonomi serta politik.

b. Kekuasaan

Menurut Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Haryanto, 2017) menganggap bahwa kekuasaan adalah sebuah kemampuan seseorang baik kelompok maupun individu dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain sedemikian rupa, hingga tingkah seseorang yang terpengaruhi tersebut sesuai dengan kehendak pelaku yang memiliki kekuasaan

Sedangkan menurut Robert A. Dahl dalam (Haryanto, 2017) menjelaskan konsep kekuasaan bahwa kekuasaan tertuju kepada hadirnya kecakapan untuk mempengaruhi dari seseorang kepada orang lain, atau dari satu pihak kepada pihak lain. Robert berpendapat, "*Suppose there are only two people in as system, A and B. A influences B to the extent that he changes*

B's actions or predispositions in some way.” Merujuk pada pendapat Dahl tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan berkaitan erat dengan perilaku.

Sedangkan Mohtar Mas'oe'd dan Nasikun dalam (Haryanto, 2017) menjelaskan bahwa kekuasaan adalah kecakapan seseorang dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain hingga orang yang dipengaruhi tersebut dapat melakukan sesuatu yang sebenarnya orang yang dipengaruhi tersebut enggan untuk melakukannya.

Dari berbagai paparan diatas dapat ditarik benang merah bahwa pengertian kekuasaan adalah syarat adanya keterpaksaan, yakni keterpaksaan pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti pemikiran ataupun tingkah laku pihak yang mempengaruhi.

c. Elit di Negara Berkembang

Elit di negara berkembang memiliki watak dan sifat berbeda dengan elit yang ada di negara yang masyarakatnya masih berpegang pada nilai-nilai tradisi lama ataupun elit yang ada di negara yang masyarakatnya dilingkupi oleh nilai-nilai modern (Haryanto, 2017).

Di negara sedang berkembang, elit yang mengendalikan pemerintahan dihadapkan dengan berbagai persoalan kompleks dan relatif sulit untuk dicarikan solusinya. Elit di negara berkembang harus terdiri dari individu-individu yang memperoleh pendidikan memadai dan memiliki pengalaman

serta wawasan dalam menghadapi permasalahan yang muncul di zaman yang semakin modern (Haryanto, 2017).

Tipologi elit yang sedang berkuasa di negara berkembang telah dipetakan oleh Clark Kerr dalam (Haryanto, 2017). Tipologi tersebut membagi elit di negara berkembang menjadi lima tipe menurut latar belakang sosial dan orientasi politiknya, yaitu:

1. Elit kelas menengah yang berasal atau muncul dari kelompok pedagang atau tukang. Pada umumnya mereka terdiri dari golongan minoritas dalam bidang keagamaan ataupun kesukuan. Kelompok ini merupakan elit baru yang perkembangannya dapat hidup berdampingan dengan elit lama. Elit yang tergolong dalam tipe kelas menengah tidak memiliki ideologi yang tegas. Sikap mereka pragmatis dengan mengutamakan individualism ekonomi dan egalitarianism politik. Elit tipe ini mementingkan mobilitas sosial yang harus segera dilaksanakan dengan cara mengejar kepentingan diri sendiri secara sehat.
2. Elit dinasti atau pemimpin dinasti berasal dari lingkungan aristocrat yang berlandaskan pada masyarakat agraris atau pedagang. Elit tipe ini selalu mempertahankan orde yang sudah ada dengan sangat berorientasi pada tradisi. Elit menurut tipe ini dibedakan menjadi dua, yakni mereka yang tergolong dalam kelompok “tradisionalis” dan mereka yang tergolong dalam kelompok “realis”. Biasanya kelompok tradisionalis tetap

menghendaki orde yang berlangsung untuk tetap bertahan dengan landasan tradisi. Kepentingan pribadi dari para elit dinasti dapat menghambat pelaksanaan modernisasi, sebab elit memiliki ketakutan terhadap posisinya yang terancam hilang apabila modernisasi berjalan dengan lancar. Mereka lebih mementingkan keluarga besar atau dinastinya ketimbang ikut aktif mendorong bergulirnya modernisasi.

3. Pejabat kolonial yang merupakan pejabat yang berasal dari pemerintahan kolonial. Pada umumnya mereka tidak terlalu berperan dalam melaksanakan modernisasi. Elit tipe ini mewakili dan bertanggung jawab kepada negara penjajah.
4. Kaum intelektual revolusioner merupakan kelompok baru yang terdiri dari para intelektual yang merupakan hasil sistem pendidikan yang ada. Elit ini memiliki pandangan bahwa kebudayaan dan struktur masyarakat yang ada selama ini sudah dianggap tidak cocok lagi bagi suatu masyarakat modern. Dengan pandangan tersebut, mereka menempatkan diri sebagai pemimpin dalam menata dan mengarahkan modernisasi yang menurutnya tidak dapat dielakkan pelaksanaannya. Ideologi mereka lebih menekankan pada gagasan seperti “panggilan histori” daripada peran mereka, termasuk dedikasi yang tinggi terhadap tugas. Elit ini juga cenderung memusatkan kekuasaan politik yang ada pada genggamannya.

5. Pemimpin nasional pada umumnya mereka berasal dari berbagai gerakan sosio-politik yang berusaha melawan penjajah, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kebanyakan di antara mereka merupakan pemimpin yang kharismatik dengan pengaruh pribadi yang menonjol. Di negara berkembang, elit seperti ini berperan di tengah-tengah masyarakat.

d. Konflik Elit dan Massa

Hubungan antar elit dan massa tidaklah selalu berjalan seiringan, kadang sering terjadi pertentangan hingga konflik yang ditimbulkan dari berbagai faktor. Umumnya permasalahan yang timbul antara elit dan massa bermula dari kepentingan yang berbeda (Haryanto, 2017).

Berbagai masalah yang mewarnai hubungan elit dan massa ialah sebuah hal wajar terjadi karena perbedaan posisi. Elit memiliki posisi kelompok superordinasi yang dapat melakukan dominasi terhadap massa yang berposisi sebagai kelompok subordinasi. Jelas bila posisi yang berbeda menciptakan kepentingan yang juga berbeda. Kepentingan yang berbeda inilah yang menimbulkan konflik pada elit dan massa. Konflik tersebut apabila tidak dikelola dengan benar akan menghadirkan konflik terbuka antar keduanya. Dapat ditarik benang merah bahwasanya konflik antar keduanya tercipta dan hadir karena tidak tercapainya titik temu perbedaan kepentingan di antara mereka. Menurut Haryanto (2017) terdapat dua cara penyelesaian yang

dilakukan oleh massa berdasarkan nilai-nilai yang hadir di lingkungannya, yaitu:

1. Nilai-nilai demokrasi yang telah hadir ditengah masyarakat menjadi sebuah solusi guna menyelesaikan masalah yang hadir dari pertentangan kepentingan antara elit dan massa dengan cara yang cenderung mekanis (Haryanto, 2017). Begitupun jadinya baik kelompok atau individu yang terlibat dalam pertentangan harus mengikuti tata cara yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.
2. Sedangkan masyarakat yang lingkungannya tidak menerapkan nilai-nilai demokrasi akan menyelesaikan masalah dari elit dan massa tanpa ada tata cara yang baku dan jelas. Hal ini diakibatkan karena ketiadaan kesepakatan antara anggota masyarakat. Biasanya penyelesaian pertentangan antara elit dan massa seperti ini dilakukan dengan tindakan penekanan oleh kelompok elit, hal ini diakibatkan karena mereka memiliki kewenangan sebagai kekuatan penekan (Haryanto, 2017). Apabila hal tersebut terjadi kemungkinan hubungan antar elit dan massa dapat berkembang menjadi sebuah konflik yang terbuka dengan kekerasan.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu istilah untuk mengidentifikasi suatu masalah yang akan diteliti dan menjadi pusat perhatian penelitian. Sehingga dapat lebih memudahkan bagi si pembaca dalam menganalisis inti penyebab dari kejadian yang telah diangkat. Setelah melihat kerangka teori yang sudah dipaparkan diatas, dengan begitu akan dijelaskan beberapa konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu :

a) Ekologi Politik

Ekologi Politik ialah suatu teori yang lebih menitik beratkan pada keterkaitan antara politik, sumber daya, dan perubahan lingkungan.

b) Gerakan Sosial Baru

Gerakan sosial baru adalah sebuah gerakan kolektif yang terbentuk karena sebuah keluhan baru sebagai usaha kolektif guna mencapai terwujudnya sebuah kepentingan bersama dengan usaha kolektif (*collective action*).

c) Elit dan Kekuasaan

Elit dan kekuasaan adalah kedudukan atau posisi pada struktur sosial terpenting, seperti pada bidang pemerintahan, ekonomi, politik, kemiliteran, pengajaran, dan agama atau kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pikiran atau tingkah laku orang lain, hingga orang yang

dipengaruhi itu mau melakukan sesuatu yang sebetulnya orang itu enggan melakukannya.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur dari sebuah penelitian yang berusaha mempermudah oleh pihak serta seseorang yang meneliti serta mencari variabel dari konsep yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, definisi operasional berisi tentang pelaksanaan penelitian pada ranah realitas yang sebenarnya terjadi dalam lingkup masyarakat. Dalam definisi operasional memiliki unsur sebagai berikut :

1. Ekologi Politik

- a. Adanya gerakan aktor ekologi politik yang mengatur pengelolaan lingkungan guna menentukan sejauh mana aktor atau pelaku tersebut berkontribusi pada pengelolaan lingkungan
- b. Adanya implikasi dari hadirnya ekologi politik

2. Gerakan Sosial Baru

- a. Adanya faktor-faktor pendorong utama hadirnya gerakan sosial baru
- b. Terjadinya berbagai keluhan baru yang semakin menjadi

3. Elit dan kekuasaan

- a. Adanya permasalahan konflik antar elit dan massa yang terjadi karena perbedaan tujuan

b. Adanya cara penyelesaian konflik antar elit dan massa

I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian proses dalam pengambilan sebuah informasi dan jawaban terkait dengan judul penelitian yang peneliti ambil. Pada tahap ini, terdapat beberapa kategori khusus yang peneliti ambil dalam mendapatkan data-data yang relevan serta data yang aktual sesuai dengan kondisi di lapangan. Dari adanya metode penelitian ini permasalahan tempat menjadi fokus utama peneliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah salah satu metode penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data spesifik, *real*, dan mendalam. Data yang sebenarnya merupakan data yang memiliki nilai yang nantinya menjadi ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada makna yang dituju (Sugiono, 2012).

2. Unit Analisis

Berdasarkan berbagai pokok pembahasan dalam ekologi politik terdapat titik fokus acuan pada lokasi penelitian yang ditekankan. Penelitian ini dilakukan serta dilaksanakan lebih tepatnya di Desa Sindumartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu langkah penting dalam proses untuk mendapatkan data maupun informasi yang relevan dan sesuai fakta dari lokasi penelitian. Pada teknik pengumpulan data terdapat beberapa tahapan yang perlu dijadikan rute dalam mendapatkan informasi yang jelas sesuai yang tersedia di lapangan. Oleh karenanya peneliti harus terampil dalam mengambil data agar data yang telah diambil tersebut menemukan titik kevalidan sesuai dengan kondisi yang ada di lokasi penelitian. Terdapat empat tahapan dalam teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Pada kategori tahapan pengumpulan data terdapat wawancara, yang menurut Burhan Asofa (2013) menyatakan bahwa metode yang digunakan dalam beberapa kali untuk mendapatkan alasan serta jawaban yang sesuai dengan realita di lapangan secara lisan yang berguna untuk tujuan tertentu, dalam hal ini khususnya untuk penelitian kualitatif yang diteliti serta dibahas lebih dalam adalah penelitian yang memiliki sifat ilmiah dan berguna untuk mengumpulkan tentang kehidupan manusia dan pendapat – pendapat dari masyarakat tentang ruang lingkup yang mereka tinggali.

b. Observasi

Observasi memiliki peran penting bagi sebuah penelitian, dalam melihat situasi maupun kondisi di lapangan sesungguhnya. Dalam tahap ini, pihak peneliti ingin mendapatkan informasi yang *up to date* dalam pola

pengolahan data. Harus memiliki beberapa kategori lokasi khusus yang seperti apa yang harus di observasi. Karena pasti ada beberapa lokasi khusus yang menjadi point penting dalam mendapatkan data yang relevan sesuai dengan realita yang ada di lapangan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa catatan serta fenomena di lokasi penelitian yang dikemas melalui media visual. Bahkan bukan hanya dikemas dengan media visual saja. Dokumentasi memiliki corak tersendiri pada pola pengemasan suatu berita yang ada seperti pembuatan majalah, bulletin, pamflet, Koran yang berasal dari hasil wawancara murni itu sendiri.

d. Kepustakaan

Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara yang detail dan terdapat beberapa metode penggunaan sebagai pelengkap seperti dengan mempelajari, mendengarkan seseorang yang telah membaca buku, dan mengkaji beberapa buku bacaan kepustakaan yang telah diteliti. Terdapat beberapa sumber data yang tertulis dan dapat dibagi atas sumber buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi.

4. Jenis dan sumber data

Jenis dan sumber data ialah sebuah langkah utama dalam sebuah penelitian guna mendapatkan data. Data yang dikumpulkan yaitu data primer

dan data sekunder, sumber utama data primer merupakan sumber data yang langsung diberikan kepada pengumpul data sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, contohnya melalui orang lain maupun dokumen.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak utama/secara langsung (tangan pertama). Dalam hal ini terjadi penekanan pada proses pemanfaatan data yang lebih. Pola penyaringan pada proses mendapatkan data harus dikemas secara tertata agar informasi jelas dan aktual.

Sumber data utama ini diperoleh dari beberapa perwakilan lembaga sekaligus kepala desa sindumartani periode 2013-2019.

Tabel 1.2 Data Primer

Teknik Pengumpulan Data	No	Sumber Data
Wawancara	1	Midiyono (Kepala Desa Sindumartani Periode 2013-2019)
	2	Bapak Saryanto (Ketua Bidang Pendidikan dan Lingkungan PSTA)
	3	Anang (Warga Desa Sindumartani)
	4	Basuni (Ketua Paguyuban Sindu Tolak Asat)
	5	Abimanyu (Kepala Divisi Pendidikan Kaderisasi dan Penelitian Pengembangan Walhi Yogyakarta)

b. Data Sekunder

Sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber – sumber yang telah ada. Akan tetapi, walaupun lebih dimudahkan dengan sumber maupun data yang telah ada. Di dalam data primer ini juga memiliki aturan khusus bila mengambil sebuah sampel data yang relevan dan harus disertai dengan tanda bukti sebagai syarat dalam pengambilan data. Contoh data sekunder misalnya catatan ataupun dokumentasi yang telah teridentifikasi secara jelas sesuai dengan bukti penerbitanya.

5. Teknik Analisis Data

Di dalam teknik analisa data memiliki 3 tahapan yang saling berhubungan satu sama lain, dan memiliki titik temu yang saling memiliki tingkatan yang kedudukannya penting di dalam teknik analisis data. Daya dukung itu meliputi reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan atau verifikasi data (Miles & Huberman, 1992). Berdasarkan permasalahan terkait dengan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh tambang menjadi inti dasar permasalahan. Maka penelitian akan dilaksanakan di Desa Sindumartani Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman.

a. Reduksi Data

Reduksi data ini merupakan beberapa kumpulan dalam meringkas data yang telah dikaji serta di dapatkan sebelumnya. Data hasil reduksi ini menghasilkan data yang lebih jelas sesuai dengan tahapan dari penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya. Bahkan, beberapa kajian serta temuan yang sebelumnya tidak bisa dikenal serta tidak teridentifikasi. Melalui pengolahan teknik reduksi data. Akan tergambar secara jelas dan mudah dalam pola cerna pembaca.

b. Display Data

Dalam kategori analisa data melalui Display Data, merupakan bentuk dari penyajian/ penglihatan data secara akuntabel. Display data di pergunakan untuk meningkatkan pemahaman studi kasus yang telah diteliti oleh pihak peneliti. Hal ini memberikan sebuah inovasi dalam analisa yang nyata. Bahwa, display data sangat membantu dan memiliki peran melalui media

c. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi Data

Pengambilan keputusan dalam analisis data ini merupakan jawaban terhadap beberapa penelitian yang telah dikaji serta ditelaah lebih dalam sebelumnya. Dalam hal ini, jawaban harus diverifikasi melalui data yang teridentifikasi yang jelas sesuai dengan penelitian yang sudah didapatkan.

Keputusan disajikan dalam bentuk yang deskriptif terkait dengan objek penelitian yang berpedoman pada kajian penelitian permasalahan tersebut.